

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan Sistem Informasi Akuntansi pada Puskesmas BLUD

Rahmadhany Hadi Kusuma¹, Sari Andayani²

*Email : rahmadhanyhk@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

***Abstract** In the current development of technology and information systems, it has a significant influence on the operational activities of an organization or company. Government agencies also use accounting information systems, one of which is in the preparation of financial reports carried out by the Regional Public Service Agency Health Center. The existence of an accounting information system makes the preparation of financial reports at the Puskesmas more organized and sustainable. The application of an accounting information system at the Puskesmas is certainly not easy, it is necessary to provide assistance in its use. This assistance is intended so that the process of preparing or inputting financial statements in the system does not occur errors and is in accordance with Government Accounting Standards. The method used in this service is to provide training and assistance to the Treasurer of the Regional Public Service Agency's Public Health Center. This training can make it easier for the Public Health Center Treasurer to input financial reports into the Public Health Center's accounting information system in accordance with Government Accounting Standards Number 13 concerning Public Service Agencies. In its implementation, mentoring activities to the Puskesmas are carried out online using a zoom meeting.*

***Keywords:** Accompaniment, Accounting Information System.*

Abstrak (Times New Roman 11, bold, italic, 1 spasi). Dalam perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini, memberikan pengaruh yang signifikan dalam kegiatan operasional suatu organisasi atau perusahaan. Instansi pemerintah juga menggunakan sistem informasi akuntansi salah satunya yaitu dalam penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. Adanya sistem informasi akuntansi membuat penyusunan laporan keuangan pada Puskesmas menjadi lebih terorganisir dan berkesinambungan. Penerapan sistem informasi akuntansi pada Puskesmas tentunya tidak mudah, perlu dilakukan pendampingan dalam penggunaannya. Pendampingan ini bertujuan agar proses penyusunan atau penginputan laporan keuangan dalam sistem tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah dengan dilakukan pelatihan dan pendampingan kepada Bendahara Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. Pelatihan ini dapat mempermudah Bendahara Puskesmas dalam melakukan penginputan laporan keuangan ke dalam sistem informasi akuntansi Puskesmas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 13 tentang Badan Layanan Umum. Dalam pelaksanaannya kegiatan pendampingan kepada Puskesmas ini dilakukan secara daring menggunakan zoom meeting

Kata kunci: Penulisan kunci atau keywords, menyesuaikan dengan bahasa dalam artikel. Kata kunci dipilih dengan cermat, tepat dan mampu mencerminkan konsep/variabel yang dikandung dalam artikel, dengan jumlah antara tiga sampai enam kata kunci. Ditulis sesuai urutan abjad, Antara kata kunci dipisahkan oleh koma (,). Kata kunci ditulis dalam Times New Roman 10.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi dan sistem informasi mempengaruhi kegiatan operasional dari suatu organisasi atau perusahaan. Hampir semua perusahaan atau organisasi membuat sistem menjadi terkomputerisasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Banyak pihak menganggap bahwa perkembangan suatu organisasi dapat dilihat dari kompleksnya penerapan sistem informasi. Saat ini, instansi pemerintah menggunakan teknologi dalam melakukan penyusunan laporan keuangan agar menjadi lebih terorganisir dan berkesinambungan. Menurut Mulyadi (2016) mengemukakan bahwa “sistem akuntansi adalah organisasi formulir, pencatatan, dan laporan yang dikordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan pengelolaan perusahaan”. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan, pemerintah harus menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah ini didukung dengan adanya struktur standar akuntansi berbasis akrual dengan mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan finansial. Berbeda dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang dicatat pada pelaporan pelaksanaan anggaran. Peraturan tersebut belum dapat menjawab kebutuhan bagi instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada publik salah satunya yaitu, melalui Badan Layanan Umum. Pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dijelaskan bahwa “Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Satuan kerja yang menerapkan Badan Layanan Umum diberikan fleksibilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan antara lain, pengelolaan pendapatan dan belanja, kas, utang dan piutang, investasi serta pengadaan barang dan jasa. Sebagai satuan kerja di lingkungan pemerintah maka Badan Layanan Umum diwajibkan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan terkait dengan kegiatan operasionalnya. Dalam penyusunan laporan keuangan BLU, dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 / PMK. 05 / 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan Badan Layanan Umum yang berada di daerah. Pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 1 dijelaskan “BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya”. BLUD sendiri juga menggunakan peraturan yang sama dengan BLU terutama dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yaitu dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13. Pada Pasal 2 Permendagri 79 Tahun 2018 menjelaskan bahwa tujuan dari penerapan Badan Layanan Umum Daerah adalah “untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, untuk membantu pencapaian tujuan dari pemerintah daerah.”

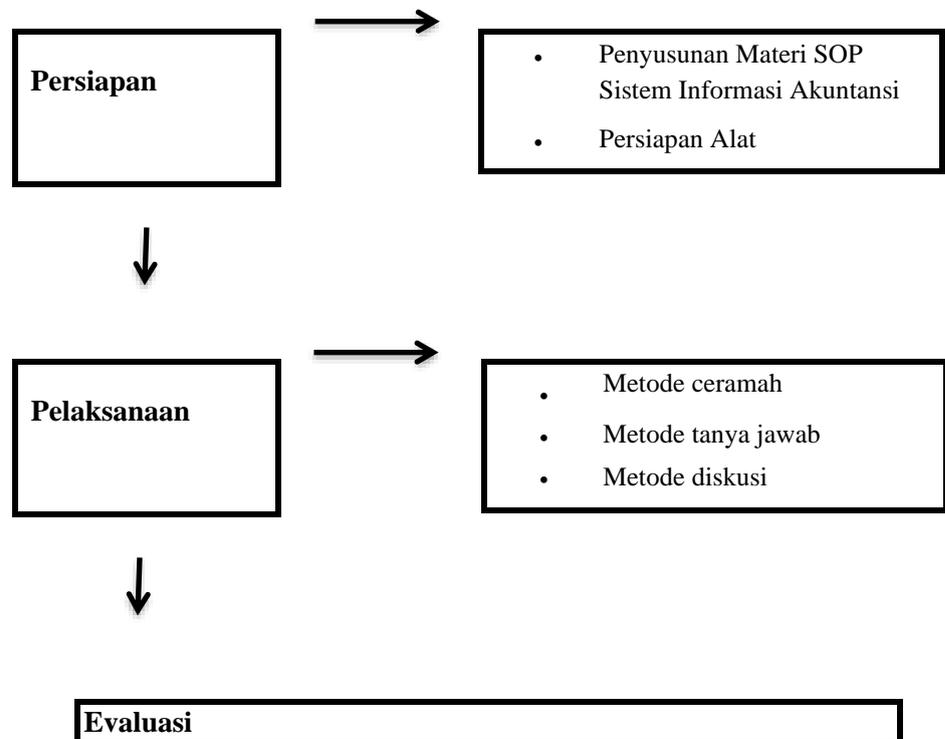
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sendiri tentunya tidak mudah karena dibutuhkan adanya tenaga ahli yang dapat memahami dan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018

tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat. Dengan adanya Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK – BLUD), tentunya Puskesmas BLUD membutuhkan pelatihan dan pendampingan dalam penerapannya. Teknologi sistem informasi yang semakin berkembang juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan yang digunakan oleh puskesmas. Adanya sistem informasi akuntansi, tentunya dapat mempermudah Puskesmas BLUD dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Penerapan sistem informasi akuntansi ini juga tidak mudah, dibutuhkan adanya pendampingan dari tenaga ahli agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penginputan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13.

Oleh karena itu, penulis menyelenggarakan pendampingan penggunaan sistem informasi akuntansi pada Puskesmas BLUD. Tujuan dari pendampingan dan pelatihan yaitu, puskesmas dapat melakukan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum dengan menggunakan sistem informasi akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu, Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 dan dapat melakukan penginputan secara mandiri agar dapat tercapai tujuan dari Badan Layanan Umum Daerah, yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.

Metode Penelitian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Puskesmas BLUD secara online dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting* berupa pendampingan bagi Puskesmas BLUD. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu Puskesmas dalam penyusunan laporan keuangan yang saat ini telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Akuntansi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kegiatan pengabdian ini akan dilakukan pada tanggal 6 Juni 2022 dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.



Tahap Persiapan

Tahap persiapan dimulai dengan melakukan survey lapangan untuk mengetahui kendala serta masalah yang dihadapi oleh puskesmas BLUD, dalam kegiatan ini juga dilakukan koordinasi dengan tim pengabdian dalam pembuatan materi Sistem Informasi Akuntansi, serta dilakukan juga persiapan peralatan yang akan digunakan sebagai media pendampingan secara daring (dalam jaringan) menggunakan *zoom meeting*. Pada tahap ini seluruh kegiatan persiapan dilakukan secara daring menggunakan *zoom meeting*. Seluruh kegiatan persiapan lebih pada persiapan peralatan dan bahan serta penyusunan materi Sistem Informasi Akuntansi, salah satu kendala yang cukup sering dihadapi ketika melakukan pendampingan dengan metode daring adalah kesiapan jaringan internet yang sering tidak stabil sehingga perlu adanya banyak persiapan dalam penggunaan jaringan internet seperti menggunakan *modem* atau *router* yang digunakan per-orang agar kegiatan dapat berjalan lancar, dan pemberian informasi dapat terjalan dengan baik. Kegiatan dilaksanakan selama satu hari. Pada tahap persiapan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal agar kegiatan dapat berjalan semakin lancar, seperti :

- 1) Tim pengabdian diberikan pemahaman materi secara teoritis dan praktis yang memadai dalam pendampingan penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem informasi akuntansi serta mampu melakukan pendampingan dengan pendekatan partisipasi aktif.
- 2) Persiapan pelaksanaan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perijinan sampai evaluasi dengan melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pihak Puskesmas BLUD.

Tahap Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada Puskesmas BLUD ini, kami menggunakan beberapa metode, antara lain:

- 1) Metode Ceramah, yaitu digunakan untuk memaparkan materi yang telah disusun oleh Tim Pelaksana. Dalam melakukan metode tersebut menggunakan pendekatan partisipasi aktif sehingga, dapat membangun suasana yang menyenangkan dan mendorong interaksi peserta agar materi dapat diterima sesuai kondisi, kebutuhan dan tepat sasaran.
- 2) Metode Tanya Jawab, yaitu digunakan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman peserta sosialisasi, terhadap yang telah disampaikan oleh Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- 3) Metode Diskusi, yaitu digunakan untuk memperlihatkan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada penyusunan laporan keuangan, serta membantu ketika terdapat kendala peng *input* an yang dilakukan oleh Puskesmas BLUD ke dalam sistem.

Tahap Evaluasi

Tahap kegiatan berikutnya adalah evaluasi. Pada tahap ini dilakukan evaluasi kegiatan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini dapat bermanfaat bagi Puskesmas BLUD. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Puskesmas BLUD ketika mengikuti program pendampingan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi diungkapkan dan dibahas ketika kegiatan pendampingan berlangsung. Ketika terjadi kendala pada sistem informasi akuntansi akan disampaikan kepada Konsultan BLUD, agar kendala yang

dialami dapat diselesaikan dengan cepat. Jika terjadi kendala dalam melakukan penginputan akan dilakukan pendampingan. Salah satu kendala yang dialami oleh Puskesmas adalah kesulitan dalam melakukan penginputan penerimaan atau pendapatan yang diterima oleh Puskesmas ke dalam sistem informasi akuntansi.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi yang makin berkembang banyak terjadi pergeseran dalam kegiatan operasional suatu perusahaan atau instansi pemerintah, dalam kendala yang dihadapi oleh pihak Puskesmas BLUD dalam memasukkan data pendapatan ke sistem informasi keuangan. Namun kendala yang dihadapi ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari beberapa staff puskesmas BLUD mengenai program sistem informasi keuangan sehingga sedikit memberikan kendala dalam pengoperasian sistem informasi keuangan.

Secara garis besar dengan adanya sistem yang telah terkomputerisasi membuat segalanya semakin terintegrasi, dapat menjadikan kegiatan operasional Puskesmas mampu berjalan lebih baik dan akuntabilitas penatausahaan keuangan akan semakin baik dan kuat. Rancang bangun Sistem Informasi Akuntansi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 13/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Pendampingan penyusunan laporan keuangan menggunakan Sistem Informasi Keuangan telah berjalan dengan sangat baik, pelatihan dapat berjalan sesuai rencana pada tanggal 6 Juni 2022 secara online menggunakan aplikasi *zoom meeting*, mulai pukul 08:00-13:00. Pelatihan ini ditujukan kepada Bendahara Puskesmas BLUD yang berlangsung dengan baik, tertib dan lancar sesuai rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Dalam pelaksanaannya peserta tampak antusias mengikuti pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian, peserta yang tampak interaktif dengan banyak menanyakan kendala yang akan mereka hadapi dalam penggunaan sistem informasi keuangan.

Gambar 1. Kegiatan Penerjunan Pendampingan Puskesmas BLUD



Pada tahap evaluasi mengenai pendampingan penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem informasi keuangan, terdapat beberapa kendala dalam penyusunan laporan keuangan yang dihadapi oleh Puskesmas BLUD. Salah satu kendala yang dialami Puskesmas BLUD ketika melakukan penyusunan laporan keuangan pada sistem informasi akuntansi terdapat selisih antara Neraca dan Laporan Arus Kas dengan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Terjadinya selisih tersebut, harus dilakukan penelusuran pada Sistem Informasi Akuntansi Puskesmas BLUD. Penyebab terjadinya dikarenakan Puskesmas BLUD telah menerima tagihan Pajak tetapi belum dilakukan pembayaran pada Sistem Informasi Akuntansi. Masalah tersebut dapat diatasi dengan melakukan *input* pembayaran pajak pada Sistem Informasi Akuntansi Puskesmas BLUD.

Simpulan

Dalam kegiatan pengabdian ini dapat kita tarik kesimpulan mengenai bagaimana kegiatan pendampingan dapat memberikan dampak positif dalam menggunakan sistem informasi akuntansi untuk penyusunan laporan keuangan Puskesmas BLUD, melalui kegiatan ini seluruh Bendahara Puskesmas BLUD, telah memahami bagaimana penggunaan sistem informasi akuntansi agar dapat terciptanya suatu laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang terintegrasi dengan baik, serta dapat melaksanakan kegiatan operasional yang lebih baik dan memiliki akuntabilitas keuangan yang lebih optimal dalam pelaksanaannya. Pendampingan yang dilakukan secara *online* tentunya menimbulkan beberapa kendala, salah satunya yaitu kendala jaringan. Saya berharap kedepannya pendampingan pada Puskesmas BLUD dapat dilaksanakan secara langsung

Daftar Pustaka

- Firmanto, Y., Trisnawati, N., Rokhman, M. T. N., & Rahayu, Y. N. 2021.
Pendampingan Konsultansi Manajemen Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Puskesmas Kota Probolinggo. Abdiku: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 44-53.
- Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- Indonesia (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tentang *Badan Layanan Umum Daerah*
- Indonesia (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217 / PMK. 05 / 2015 Tentang *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13*
- Indonesia (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*